

LEX PUBLICA

Jurnal Ilmu Hukum Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Januari 2014

ISSN : 2354-9181

PERMASALAHAN OUTSOURCING DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. St. Laksanto Utomo, SH., MH

KEWAJIBAN PENGANGKUT KEPADA PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN DALAM UNDANG-UNDANG PENERBANGAN NASIONAL

Oleh : Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UU NO.2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh : Pristika Handayani, SH.,MH

PERSEKTIF PENERAPAN ANALOGI DALAM HUKUM PIDANA

Oleh : Iwan Darmawan, SH., MH.

FUNGSI LEGISLASI DPD RI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012

Oleh : Yenny AS, SH., MH

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ATURAN DAN SANKSI PELANGGARAN LALU LINTAS PENGENDARA SEPEDA MOTOR

Oleh : Surajiman, SH., MH dan Diah Ratu Sari Harahap, SH.. MH

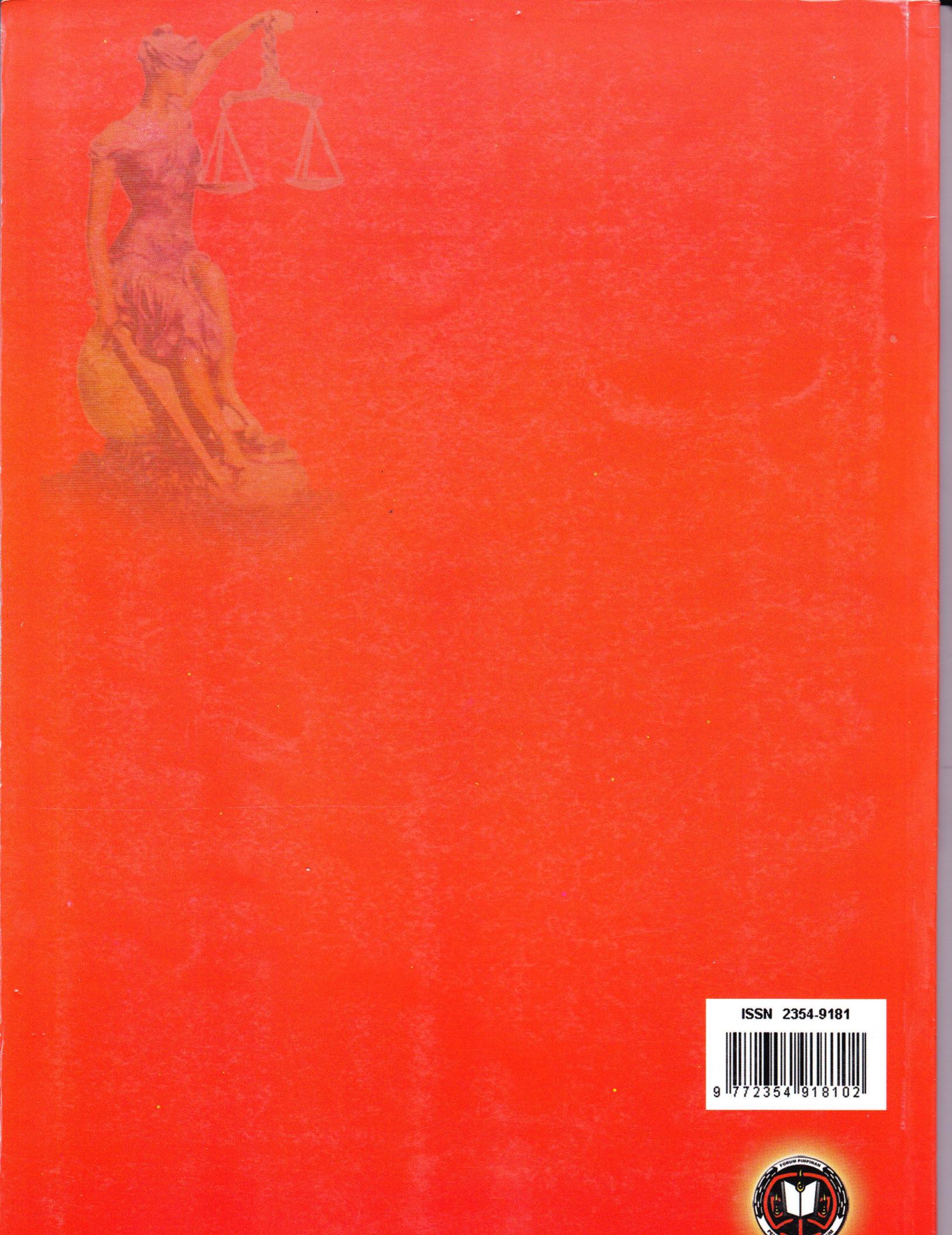
STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI : KAJIAN LEGAL SOSIOLOGIS

Oleh : Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM

INVESTASI BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Dr Hj. R.A. Evita Isretno Israhadi SH., MH

Diterbitkan oleh :
Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia



ISSN 2354-9181

A standard linear barcode is positioned within a white rectangular box in the bottom right corner of the cover.

9 772354 918102



Diterbitkan oleh Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum, dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah hukum. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, praktisi dan siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas.



LEX PUBLICA

SUSUNAN REDAKSI

Pembina :

- Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH
- Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MH
- Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM

Penanggung Jawab :

Ketua Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum
- Surajiman, SH, MH

Redaktur Pelaksana

- H. Azis Budianto, SH, MS.

Dewan Redaksi

- Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum
- Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH
- Liza Marina, SH, MH
- Hj. Megawati Barthos, SH, MM

Sekretaris

- Rineke Sara, SH, MH

Bendahara

- Dr. Erni Agustina, SH, SKn

Mitra Bestari

- Prof. Dr. Hj. Mella Ismeliana FR, SH, MHum
- Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
- Prof. Dr. Aswanto, SH, MH
- Prof. Dr. Waty, SH, MH
- Prof. Dr. Zainudin Ali, SH
- Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MH, MM

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum Universitas Borobudur
Jl. Raya Kalimalang No. 1, Jakarta Timur.
Telp: (021) 8613877, 8618293. 44426200
email : lex_publica@yahoo.com
<http://www.forumppthi.com>

ISSN 2354-9181

Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat,tanpa merubah maksud dan isinya.
Jurnal Ilmiah Kwartalan, Terbit : Januari, Mei, September.

Mulai nomor ini, terbit dengan 100 halaman.

Design dan cetak oleh: Cintya Press Jl. Raya Pasar Minggu No. 2, Komplek Bangdes - Jakarta Selatan

JURNAL LEX PUBLICA

FORUM PIMPINAN
PENDIDIKAN TINGGI HUKUM INDONESIA

DAFTAR ISI

Vol. 1. No. 1, Januari 2014

Dari Redaksi

PERMASALAHAN *OUTSOURCING* DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MH 1 - 11

KEWAJIBAN PENGANGKUT KEPADA PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN DALAM UNDANG-UNDANG PENERBANGAN NASIONAL

Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM 12 - 24

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UU NO.2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh : Pristik Handayani, SH., MH 25 - 29

PERSPEKTIF PENERAPAN ANALOGI DALAM HUKUM PIDANA

Oleh : Iwan Darmawan, SH., MH 30 - 34

FUNGSI LEGISLASI DPD RI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012

Oleh : Yenny AS, SH., MH 35 - 40

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ATURAN DAN SANKSI PELANGGARAN LALU LINTAS PENGENDARA SEPEDA MOTOR

Oleh: Surajiman, SH, MH dan Diah Ratu Sari Harahap, SH., MH 41 - 54

STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI : KAJIAN LEGAL SOSIOLOGIS

Oleh : Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MM 55 - 69

INVESTASI BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Dr. Hj. R.A. Evita Isretno Israhadi SH, MH 70 - 97

KEWAJIBAN PENGANGKUT KEPADA PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN DALAM UNDANG-UNDANG PENERBANGAN NASIONAL

Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, MM*

Abstrak

Angkutan udara merupakan salah satu moda transportasi yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia saat ini, karena aspek kecepatan dan keselamatan lebih terjamin. Namun demikian masih sering terjadi kecelakaan pesawat atau peristiwa lain yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang sebagai konsumen dalam penyelenggaraan penerbangan nasional. Apabila terjadi peristiwa semacam ini, maka perusahaan penerbangan sebagai pengangkut berkewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawab dalam pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kata kunci: Kewajiban Pengangkut, Kecelakaan Pesawat Udara, Ganti Kerugian.

Abstract

Air transport is one of the most favorable mode of transportation chosen by Indonesians nowadays due to its relative warranty on speed and safety aspect. However, aircraft accidents is still rampant or other incidents that causes loss to passengers in the wake of its national trade. Should such event occurs, then the airline company as carrier bears the responsibility to provide compensation to victims based on Law No. 1 Year 2009 on Air Aviation.

Keyword : Carrier Responsibility, Aircraft Accident, Reparation.

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Jln. Letjend. S. Parman No. 1 Grogol - Jakarta Barat (11440). Telp: (021) 5671748, 5604477, Fax: 5638336. HP: 085885834385. Email: ahmads@tarumanagara.ac.id.